

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
PEMANCINGAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TIKET**

**(Studi Kasus di Pemandangan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

ANDI ADE ANUAR

NPM. 1521030452

Jurusan : Muamalah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2019M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA
PEMANCINGAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TIKET**

**(Studi Kasus di Pemandangan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab.
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

ANDI ADE ANUAR

NPM. 1521030452

Jurusan : Muamalah

Dosen Pembimbing I : DR. H. KHAIRUDDIN, M.H.

**Dosen Pembimbing II : ABDUL QODIR ZAELANI, S.H.I.,
M.A.**

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440H/2019M

ABSTRAK

Memancing yang dahulu lebih berorientasi kepada mencari nafkah, berbanding terbalik di jaman sekarang yang lebih mengutamakan bersenang-senang, pada jaman dahulu pemancingan sulit ditemukan kecuali ditempat dan lokasi yang pada dasarnya memiliki distribusi air alam yang cukup. Pemancingan pada jaman sekarang sudah berkembang secara pesat, bahkan dijadikan sebagai tempat lokasi usaha, dan sudah mempunyai beberapa sistem, salah satunya sistem pembayaran melalui tiket. Pada saat melakukan awal masuk pemancingan pengunjung membayar tiket masuk dan mendapatkan sewaan objek pancing setiap orangnya satu. Namun ada hal lain yang dianggap remeh oleh pekerja pemancingan dengan adanya kesalahan saat melaksanakan akad yang dilakukan dalam penyertaan terhadap pemberian sewaan objek pancing kepada pihak pengunjung terlihat adanya pembayaran dobel (berlipat) setelah menggunakannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pemancingan sistem tiket di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana mana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa pemancingan dengan pembayaran melalui sistem tiket di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik sewa-menyewa pemancingan dengan sistem pembayaran tiket apakah sesuai syariat Islam dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pemancingan dengan sistem pembayaran tiket.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode berfikir menggunakan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa-menyewa dengan objek sewa pancing yang dilakukan oleh pekerja pemancingan adalah adanya fakta pembayaran dobel (berlipat) tanpa penjelasan kepada pihak pengunjung pemancingan. Pandangan hukum Islam terhadap sewa-menyewa dengan sistem pembayaran tiket dengan objek sewa pancing adalah tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun, syarat, maupun prinsip-prinsip dalam akad sewa-menyewa fakta dari pengunjung menyatakan sebagian tidak rela membayar kembali terhadap sewaan pancing yang diberikan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA PEMANTINGAN
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TIKET (Studi
Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec.
Jati Agung Kab. Lampung Selatan)**

Nama : Andi Ade Anuar

NPM : 1521030452

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

Pembimbing II

**Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin.M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PEMANCINGAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TIKET (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)"** disusun oleh : **Andi Ade Anuar**, NPM : **1521030452**, program studi : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Rabu, 9 Oktober 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Drs. Susiadia AS., M. Sos.I. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghaifari, S.Ud., M Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹ (QS. An-nisa (4) : 29)



¹Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1974), h.

PERSEMBAHAN

Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tandacinta, dan kasih sayang , serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Terimakasih kepada orang tuaku, Ayah dan Ibu (Saipul Anwar dan Habsah Desi Lita), yang senan tiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril maupun materil, dan terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih Kakakku Devy Litasari dan Adikku Maya Oktavia, Ratna Sari, Arta Wiguna yang selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai.
3. Teman-teman Jurusan Muamalah E angkatan 2015 dan sahabat-sahabat terbaikku Agung Tri Pratama, Erwinsyah (terima kasih telah menjalin pertemanan dengan ikhlas dan tulus, serta kebaikan-kebaikan kalian selama masa perkuliahan baik didalam maupun diluar kampus, semoga tali silaturahmi kita tetap bisa terjaga walaupun kita sudah sering tak bertatap muka).
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Andi Ade Anuar, lahir di Pasar 26 ilir suwak bato, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 November 1996, anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Saipul Anwar dan Ibu Habsah Desi Lita.

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Satria Kota Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
2. SDN 01 Waydadi Kota Bandar Lampung, pada tahun 2004 dan selesai 2009.
3. SMP 06 PGRI Kota Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai 2012.
4. SMAN 12 Kota Bandar Lampung, pada tahun 2012 dan selesai 2015.
5. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah, angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya juga nikmat ilmu pengetahuan, sehat dan iman. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan) dapat terselesaikan. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat Syafa'at dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari'ah. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulisan dan penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis mengahaturkan beribu-ribu terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

2. Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para staf di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu guna bekal dihari nanti.
5. Kedua orang tuaku, Bapak Saipul Anwar dan Ibu Habsah Desi Lita yang selalu berdoa dan berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku.
6. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amalah 2015, khususnya Mu'amalah E.
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semuanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Bandar Lampung, 14 November 2019

Andi Ade Anuar
1521030452

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Islam.....	16
1. Pegertian Akad.....	16
2. Dasar Hukum Akad.....	18
3. Rukun dan Syarat Akad.....	22
4. Macam-macam Akad.....	25
5. Prinsip-prinsip Akad.....	28
6. Sah dan Batalnya Akad.....	31
7. Berakhirnya Akad.....	38

B. Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>).....	39
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>).....	41
3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>).....	43
4. Sifat Akad Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>).....	44
5. Macam-Macam Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>).....	45
6. Pembayaran Upah dan Sewa.....	46
7. Menyewakan Barang Sewaan.....	46
8. Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (<i>Ijârah</i>)....	47
9. Pengembalian Barang Sewaan.....	48
C. Kajian Pustaka atau Peneliti Terdahulu.....	

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian Desa Jatimulyo.....	49
B. Gambaran Umum Tentang Pemancingan Balong Desa Jatimulyo..	54
C. Praktik Pelaksanaan Sewa-Menyewa Dengan Sistem Pembayaran Tiket Pada Pemancingan Balong Desa Jatimulyo.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Sewa-Menyewa Dengan Sistem Pembayaran Tiket Pada Pemancingan Balong Desa Jatimulyo.....	
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Dengan Sistem Pembayaran Tiket di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo.....	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket” (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan). Istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil **meninjau**, pandangan, pendapat, (menengok, memeriksa mengamati dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*. Yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam, sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang kala membingungkan, kalau tidak tau persis maknanya.³
3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata.⁴
4. Sewa-Menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

³Ali Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 109.

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut dengan latar belakang itu disanggupi pembayarannya.⁵

5. Akad adalah suatu perikatan, perjanjian, persetujuan, dan mufakat.⁶

6. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

7. Tiket adalah karcis kapal, pesawat terbang, dan sebagainya .⁸

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian yang menjabarkan tentang pengaruh yang akan terjadi padapraktik sewa-menyewa yang berakibat sah atau tidaknya di pemancingan balong desa jatimulyo dengan para pengunjung yang datang melalui sistem pemabayaran tiket.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket” (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).

Adapun Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

⁵Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008), h. 381.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakart: Kencana, 2010), h. 51.

⁷Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 9.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., h. 1191.

Karena adanya Sewa-Menyewa Pancing Dengan Sistem Pembayaran Tiket di Pemancingan Balong, dan perlu diketahui status hukumnya ditinjau dari hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Adapun alasan subjektif dalam memilih serta menentukan judul adalah:

- a. Penelitian ini didukung dengan literatur yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu, judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat masalah penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa dalam *fiqh* disebut *ijārah* yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁹ Oleh karena itu *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas suatu pemanfaatan barang atau suatu kegiatan. Dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang

⁹M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 227.

diharamkan yang nantinya berakibatkan sah atau tidaknya sewa-menyewa tersebut.

Ijârah terbagi dalam dua macam, yaitu *ijârah* yang berhubungan dengan sewa jasa dan *ijârah* yang berhubungan dengan asset atau properti. *Ijârah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.¹⁰ Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.¹¹

Para ulama sepakat, hukum *ijârah* secara umum diperbolehkan, sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 233:



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang

¹⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.131.

¹¹Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.216.

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa sewa-menyewa jasa itu diperbolehkan, karena pada dasarnya sewa-menyewa tersebut adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad untuk saling meringankan, serta termasuk bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Tetapi dalam sewa-menyewa tersebut harus sesuai dengan yang di bolehkan menurut *syar'at*.

Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik pelaksanaan sewa-menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan sewa-menyewa sejauh ini yang masih dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan hukum Syari'at Islam.

Pada umumnya pemancingan adalah suatu tempat wisata hiburan bagi para pengunjung yang datang untuk memancing ikan, tetapi semakin pesatnya era zaman modern sekarang pemancingan banyak sekali bermacam-macam segi peraturannya yang telah mereka buat sendiri untuk memikat para pengunjung agar tertarik dan tidak memikirkan dampak akibatnya. Pemancingan diberbagai tempat telah membuat peraturannya masing-masing. Contoh: ada yang memakai

sistem siraman yang dimana pemilik pemancingan itu menaruh ikan lalu mereka memberi tau kepada pengunjung yang datang apa bila telah mendapatkan ikan yang telah ditentukan, misalkan ikan gurame, nila, mas, dan lain lain. Maka pengunjung akan mendapat hadiah yang dimana hadiah tersebut telah disediakan oleh pemilik dan penjaga pemancingan, hadiah itu sendiri terdiri dari berbagai macam seperti tv, kipas angin, dan lain-lain.

Adapun peraturan lain pada kolam pemancingan digunakan untuk hiburan dengan sistem kiloan bukan untuk ajang taruhan seperti yang telah dikemukakan diatas. Salah satu pemancingan yang penulis dapat dari mewawancarai pemilik dan penjaga pemancingan di balong ini berbeda dengan yang lain, dimana akad pertama kolam pemancingan balong ini melakukan sistem pembayaran tiket pada awal masuk kolam pemancingan dengan per-tiket seharga Rp.15.000 dan termasuk pancingan yang pengunjung dapat untuk waktu misal dari pagi sampai dengan sore hari.

Akan tetapi permasalahan yang didapat dalam akad tersebut tidaklah sesuai dengan kejadiannya, dimana pada akhir selesai menyewa kolam pemancingan penjaga yang lainnya meminta uang kembali kepada pengguna kolam pemancingan sebesar Rp.10.000 dengan alasan memakai pancingan seharian penuh, dan data dalam tiket yang diberikan kepada pengguna sewa pancing tidaklah ada waktu

batasan dalam penggunaan pancingan dan hanya berisikan tanggal bulan tahun.

Maka dari itu dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, karena ada unsur *gharar* mengenai hal tersebut, dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Pemancingan Dengan Sistem Pembayaran Tiket”. (Studi Kasus di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa pemancingan dengan sistem pembayaran tiket di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo Kecamatan. Jati Agung Kabupaten. Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan sewa-menyewa dengan sistem pembayaran tiket pada pemancingan Balong Desa Jatimulyo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa dengan sistem tiket di pemancingan Balong Desa Jatimulyo?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik sewa-menyewa pemancingan dengan sistem pembayaran tiket apakah sesuai syariat Islam.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa pemancingan dengan sistem pembayaran tiket.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa pancing di pemancingan balong desa jatimulyo.

- b. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah dalam upaya pemikiran dalam bidang Hukum Islam.

G. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah sewa-menyewa pemancingan balong khususnya mengenai sewa-menyewa pemancingan balong dengan sistem pembayaran tiket dari perspektif hukum Islam.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyewa maupun menyewakan untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik sewa-menyewa yang lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang bermuamalah khususnya berkaitan dengan sewa-menyewa pemancingan balong dengan sistem pembayaran tiket.

H. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenal

berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹² Adapun masalah dalam metode penelitian ini penulis menguraikannya sebagai berikut :

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu yang menjadi objek, fenomena-fenomena, gejala sosial dari suatu kelompok tertentu.¹³ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sewa-menyewa pancing di pemancingan balong.

b. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

¹²Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta; Bumi Aksara, 1997), h.1.

¹³Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh(Bandung; CV.Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁵Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.10.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para penjaga dan pengguna kolam pemancingan di Balong.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan. Dan sumber-sumber lain yang relevansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, baik yang berupa buku pokok, hasil pokok, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.¹⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini dari pengunjung yang datang setiap harinya tidak menentu terkadang 11 orang, 13 orang, dan 15 orang tetapi yang pasti

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*. Jilid I, Cetakan ke-IV, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), h.78.

¹⁷Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta; Bumi Aksara, 2006), h.58.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

datang setiap harinya 15 orang yang terdiri dari pemilik pemancingan 1 orang, penjaga pemancingan 3 orang dan 11 orang pengunjung. Maka dari itu penulis tetapkan yang akan diteliti adalah sebanyak 15 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih. Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 orang terdiri dari 1 orang pemilik, 3 orang penjaga, dan 11 orang pengunjung di Pemancingan Balong Desa Jatimulyo.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi (narasumber) atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁹ Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya adalah penjaga dan pengguna kolam pemancingan di balong desa jatimulyo.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

¹⁹A.MuriYusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 372.

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemizing*)

Bertujuan menempatkan dan mengatur kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁰ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisa secara *deskriptif* dan *kualitatif*, yaitu sesuatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti. Analisis *kualitatif* ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat diartikan kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisis data digunakan kerangka berfikir deduktif.

²⁰Abdulkodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.126.

Metode berfikir deduktif,²¹ yaitu berangkat dari pengetahuan bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran-gambaran umum proses pelaksanaan tradisi manipulasi dalam praktik menyewakan barang sewaan melalui penelaahan beberapa *literature* dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



²¹Sutrisno Hadi, *Metode riserch*, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993), h.41.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian Akad

Sebelum mengetahui pengertian yang lebih dalam mengenai sebuah akad sewa-menyewa maka yang paling utama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah definisi mengenai akad itu sendiri, karena sewa-menyewa atau *ijârah* adalah merupakan salah satu yang ada dalam kajian *muâmalah*. Secara bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu, *uqûd* jamak dari *aqd* adalah mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.²²

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Damyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.²³

Menurut pendapat ulama Syâfi'iyah, Mâlikiyyah dan Hanâbilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang

²²Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah*, (Jakarta: Ganesa Press, 2000), h. 154.

²³Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Desember 2015), h. 786.

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.²⁴

Sedangkan menurut para ahli, akad didefinisikan sebagai berikut:

a. Muhammad ‘Azîz Hakîm.

Beliau mengemukakan bahwa akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (*îjab*) dan penerimaan (*qabûl*) yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Îjab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabûl* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.²⁵

b. Ghufon A. Mas’adi.

Mengemukakan bahwa akad adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.²⁶

c. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara *îjab* dengan *qabûl* secara dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.²⁷

²⁴*Ibid.* h. 155.

²⁵Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), h.192.

²⁶Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.192.

²⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.21.

d. Zainal Abdulhaq.

Mengemukakan bahwa akad adalah membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syari'i.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang bersifat mengunci antara pihak pertama dan pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syari' yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek *ijab* dan *qabûl*.

2. Dasar Hukum Akad

Prinsip dasar akad adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini bergantung dari segi *lâzim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat *lâzim*, maka berkewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jâiz*, hanya sebatas *disunnah* kan saja, karena termasuk kebajikan yang dianjurkan syara'.²⁹

Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatâwâ Al-Kubrâ* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastanih berpendapat bahwa sesungguhnya akad itu harus ditepati karena syara' sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Akad yang

²⁸Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.76.

²⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h.7.

harus ditepati itu termasuk akad yang disepakati oleh syara' begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.³⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi akad adalah sebagai berikut:³¹

a. *Al-Qur'an*.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: *Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.*

Q.S Al-Ma'idah ayat (5) : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ

³⁰Hannan binti Muhammad Husein Jastanih, *Aqsâm al-'Uqûd fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Mekkah: Jam'iah Umm al-Qura, 1418 H/1998 M), h.7.

³¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'âm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Juz I, h. 269-271.

وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Q.S Al-Mu'minûn (23) : 23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ فَقَالَ يَنْقُومِرَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya).

Q.S Al-Baqarah (2) : 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.

Q.S Ali-Imrân (3) : 3

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ
وَإِنجِيلَ

Artinya: Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.

b. *Al-Hadîst*.

Al-Hadîst adalah sumber kedua yang merupakan pedoman menghisbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *hadîst* mengemukakan tentang sewa-menyewa antara lain:

Hadîst dari ‘Abdullah bin Yûsûf, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَبُيْعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ تَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه البخارى)³²

Artinya: Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (*al-khiyâr*) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli maka akad jual beli ini juga sudah sempurna.” (HR. Bukhari).

³² Muhammad bin Ismail, al-Bukhari, No. 2034, Juz. III (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2009), h. 64

Dilanjutkan dari Jâbir bin Abdullah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري)³³

Artinya: *Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat*”(HR. Bukhari).

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.³⁴ Akad juga terbentuknya karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘âqidân*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shîghah al-‘aqd*),
- 3) Objek akad (*mahal al-‘aqd*), dan
- 4) Tujuan akad (*maudhû ‘al-‘aqd*).

³³ Muhammad bin Ismail, al-Bukhari, No. 2034, Juz. III..., 198

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 95.

ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.³⁵

b. Syarat-Syarat Akad

Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luẓûm*).³⁶

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanâfiyyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudaran, dan syarat-syarat jual-beli rusak (*fâsid*).³⁷

³⁵*Ibid*, h. 96.

³⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 64.

³⁷Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV, h. 6.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).³⁸

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- c) Syarat Kepastian Hukum (*Luzûm*).

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzûm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyâr jual beli, seperti khiyâr syarat, khiyâr aib, dan lain-lain. Jika *luzûm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

d. Syarat Dampak Akad

Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

³⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, h. 65.

a) Dampak Khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan sesuatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah dan sewa-menyewa.

b) Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.³⁹

4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.⁴⁰

a. *'Aqd al-Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. *'Aqd al-Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

c. *'Aqd al-Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan

³⁹*Ibid.* h. 65-66.

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 50.

ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan sebagai berikut:⁴¹

1) Dalam keadaan *muwâdha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini:

a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahir saja untuk menimbulkan sangkaan kepada orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut dengan *mutawâdhah* pada asal akad.

b) *Mu'âwadhah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang yang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *nâib* (pengganti) wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *nâib*, hal ini disebut juga *muwâdha'ah fî al-badal*.

c) *Mu'wadhah* pada pelaku (*ism al-musta'âr*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniah

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 52.

untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakâlah sirriyah* (perwakilan rahasia).

2) *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihzâ'*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, yang antara lain *muwâdha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; "*Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda*" atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya *qarînah* (indikasi) terjadinya *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a) *Ikrâh* (keterpaksaan), yaitu cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b) *Khilâbah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- c) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

⁴²*Ibid.*

5. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁴³

Bermu'amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa prinsip-prinsip akad mu'amalah dalam Islam:

- 1) Dalam bermu'amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari mu'amalah antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan,

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2012), h. 71.

maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermu'amalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.⁴⁴

2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu'amalah.

Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.⁴⁵ Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.

3) Dalam bermu'amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁴⁶ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalunya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermu'amalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli gharar, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UII, 1990), h. 10.

⁴⁵ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 288.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat....*, h. 10.

merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

- 4) Prinsip semua akad dan mu'amalah tidak bisa sempurna kecuali dengan mengharapkan ukuran dan membataskan harga.⁴⁷ Semua mu'amalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyapun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkarannya sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.
- 5) Prinsip dalam bermu'amalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual-beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.
- 6) Prinsip mu'amalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.⁴⁸
- 7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.

⁴⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 196.

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, h. 11.

8) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.

6. Sah dan Batalnya Akad

a. Akad Sah

Akad yang ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu:

- 1) Adanya kewenangan atas objek (aset yang menjadi objek).
- 2) Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Akan tetapi, meskipun syarat ini juga telah terpenuhi masih ada dalam akad itu kemungkinan hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat akad itu sendiri atau karena adanya beberapa jenis khiyâr (hak opsi) yang dimiliki oleh salah satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak, maka itu merupakan akad yang sah dan menimbulkan akibat hukum serta akibat hukum itu telah dapat dilaksanakan.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi.⁴⁹

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah:

- 1) Akad *bâthil*.
- 2) Akad *fâsid*.
- 3) Akad *mauqûf*.
- 4) Akad *nâfidz ghair lâzim*, dan
- 5) Akad *nâfidz lâzim*.

Mazhab-mazhab lain tidak membedakan akad *bâthil* dan akad *fâsid*, bagi mereka keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merupakan akad yang batal dan tidak ada wujudnya sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.⁵⁰

a. Akad *Bâthil* (Batal)

Kata *bâthil* dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bâthil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan “batil

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, hal. 244.

⁵⁰Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-‘Aqd al-Mauquf fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah bi al-Qanun al-Madani*, (Kairo: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1969), h. 18.

berarti batal, sia-sia, tidak benar,”⁵¹ dan “batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.”⁵² Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batil adalah bentuk *mashdar* dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *bâthil* secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya.”⁵³ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *bâthil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

Hukum akad *bâthil* , yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:⁵⁴

1. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i, secara syar’i tidak pernah dianggap ada dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Misalnya anak kecil yang melakukan akad atau orang

⁵¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 98, kolom 2.

⁵²*Ibid*, h. 97, kolom I

⁵³Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 337.

⁵⁴Khalid Abdullah id, *Mahadi’ at-Tasyri’ al-Islami*, (Rabat: Syirkah al-Hillal al-Arabiyyah li ath-thiba’ah wa an-Nasyr, 1986), h. 430.

yang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda tidak berharga dalam pandangan syara' seperti narkoba atau benda *mubâh* yang tak bertujuan.

2. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *bâthil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad *bâthil* tersebut. Misalnya, barang yang diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda.

3. Akad *bâthil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *mauqûf*. Misalnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad tersebut sejak semula tidak sah.

4. Akad *bâthil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Misalnya, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan kepada pembeli.

5. Ketentuan lewat waktu (*al-taqaddum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Misalnya, penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli

menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah tersebut maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapapun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.

c. Akad *Fâsid*.

Kata *fâsid* berasal dari kata Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah *fasad* dan *mafsadah* yang berarti kerusakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan *fâsid* adalah suatu yang rusak (perbuatan, pekerjaan, isi hati).⁵⁵

Akad *fâsid* menurut ahli-ahli hukum Hanafî, adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Perbedaan dengan akad *bâthil* adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok maupun sifatnya, yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud sifat adalah syarat-syarat keabsahan yang telah disebutkan terdahulu. Jadi singkatan akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fâsid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

Mayoritas ahli hukum Islam Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî tidak memebedakan antara akad *bâthil* dan akad *fâsid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah karena tidak

⁵⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasan..., h. 1986.

menimbulkan akibat hukum apapun.⁵⁶ Hukum akad *fâsid* yaitu sebelum dilaksanakan (sebelum penyerahan objek) yaitu akad *fâsid* pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak dapat diratifikasi, dapat pula mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dan wajib *difasakhkan*.

d. Akad *Mauqûf*.

Kata *mauqûf* diambil dari kata Arab, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *mauqif* yang berarti tempat perhentian sementara atau halte.⁵⁷ Bahkan satu akar dengan kata wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya.

Sebab yang dapat menjadikan suatu akad bersifat *mauqûf* ada dua, yaitu:

1. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.
2. Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.

e. Akad *Nâfidz Ghair Lâzim*.

Nâfidz adalah kata Arab yang belum terserap kedalam bahasa Indonesia dan secara harfiyah berarti berlaku, terlaksana serta

⁵⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, h.249.

⁵⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,..., h. 639, kolom 1.

menembus. Ada hubungannya dengan kata *tanfidz* yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan (*tanfidziah*) berarti eksekutif. Akad *nâfidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, akad ini adalah lawan dari akad *mauqûf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah terpenuhi, maka akadnya menjadi akad *nâfidz*.⁵⁸

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqûf* (ditangguhkan).⁵⁹ Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti masa *khiyâr*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *ghair lâzim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau *ghair lâzim* pada satu pihak dan *lâzim* pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

⁵⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat...*, h. 255.

⁵⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...*, h. 70.

Adapun pembatalan pada akad *lâzim*, terdapat dalam beberapa hal berikut:⁶⁰

- a. Ketika akad rusak.
- b. Adanya *khiyâr*.
- c. Pembatalan akad.
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad.
- e. Masa akad berakhir.

B. SEWA-MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sewa-menyewa.

Ijârah berasal dari kata al-ujru yang berarti al-iwadhu yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pengganti.⁶¹ Dari sebab itu *ats tsawab* (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.⁶² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah secara umum adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶³ *Ijârah* terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijârah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syâfi'î*, berpendapat bahwa *ijârah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun

⁶⁰*Ibid*, 70-71.

⁶¹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), h. 4.

⁶²Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2016), h. 141.

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., h. 1470.

dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sâbiq menjelaskan makna *ijârah* dengan sewa-menyewa.

Berdasarkan dua buku tersebut ada perbedaaan terjemahan kata *ijârah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijârah*.⁶⁴

Akad *ijârah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁵ Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *al-ajr* atau *ujrah* (upah), manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaatnya dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'âwadhah* (penggantian).⁶⁶

Ijârah merupakan bentuk *muâmalah* yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadannya. Konsep *ijârah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Manfaat sesuatu dalam konsep *ijârah*,

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 113.

⁶⁵Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol. XII, (Juni 2015), h. 497.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), h. 15.

mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. *ijârah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.⁶⁷

2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

a. *Al-Qur'ân*.

Al-Qur'ân adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam mencantumkan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama, Dalam masalah sewa-menyewa terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (233) : 2

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

⁶⁷Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 131.

janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Q.S Al-Qashas (28) : 28

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ
مَا نَقُولُ وَكَيلٌ ۝٢٨

Artinya: Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan."

Q.S Al-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. *Al-Hadīst*.

Al-Hadīst adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistbat (menetapkan) suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun *hadīst* yang mengemukakan tentang sewa-menyewa antara lain:

Dari riwayat Ahmad, Abū Daud, dan Nasā'i dari Sa'ad bin Abī Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَا فِي مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أحمد)⁶⁸

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana, Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abū Daud).

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

Agar transaksi akad *ijârah* menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijârah*. Adapun yang menjadi rukun *ijârah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabûl* dengan lafaz *ijârah* atau *isti'jâr*. Rukun *ijârah* menurut *jumhûr* ulama ada tiga, yaitu 1) *al-‘âqidâni* yang terdiri dari *al-mu'ajir* dan *al-musta'jir*, 2) *shîghat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabûl*, dan 3) *al-ma'qûd'alaih* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaat.⁶⁹

a. *Al-mu'jir* dan *al-musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah

⁶⁸Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, No. 1582, Juz III, (Berut: Al-Risalah, 2009) h.

⁶⁹Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017),h.205.

dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dan untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* adalah *bâligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b. *Shîghat* adalah *îjab* dan *qabûl* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Îjab* dan *qabûl* sewa-menyewa dan upah-mengupah, *îjab* dan *qabûl* dalam praktek sewa-menyewa misalnya: “*Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.500.000*”, maka *musta'jir* menjawab “*Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari*”.

c. *Al-Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Dan manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Sifat Akad Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

Ulama fikih berpendapat, apakah obyek *ijârah* bersifat mengikat atau tidak?

Ulama mazhab Hanafî berpendapat, bahwa akad *ijârah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhûr ulama berpendapat, bahwa akad *ijârah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafî, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijârah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut jumhûr ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

5. Macam-Macam Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

Dilihat dari segi obyeknya *ijârah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijârah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijârah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

b. *Ijârah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijârah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijârah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijârah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.⁷⁰

6. Pembayaran Upah Dan Sewa

Jika *ijârah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abû Hanîfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syâfi'î dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada *hadîst* yang diriwayatkan Ibnu Mâjah, Rasulullah SAW bersabda:

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja kering”.

⁷⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 236.

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akadsewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijârahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

7. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula.⁷¹

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.

8. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

Ijârah adalah jenis akad *lâzim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijârah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 121.

Ijârah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:⁷²

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jûr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh mem*fasakh* akad *ijârah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh*kan sewaan itu.

9. Hikmah Sewa-Menyewa (*Ijârah*)

Ijârah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahnyâ kehidupan sehari-hari, apabila *Ijârah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, *Ijârah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁷³

⁷²*Ibid*, h.121-122.

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13..., h. 199.

10. Pengembalian Barang Sewaan

Jika *ijârah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqâr*), ia wajib menyewerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.⁷⁴

Mazhab Hanbalî berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahkannya, seperti barang titipaan.

C. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, Redho Firdaus dengan judul: Persepektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegeringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Fokus Penelitian yang dilakukan Redho Firdaus dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.123.

Kedua, Yofiana Eka Pratiwi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Usaha Pemancingan Di Pemancingan Sejuta Desa Sidowoyah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UM Surakarta, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Fokus penelitian yang dilakukan Yofiana Eka Pratiwi ialah tentang praktik akad usaha pemancingan. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Yofiana Eka Pratiwi dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Kertiga, Aditya Surya Dinata dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Memancing Dengan Sistem Galatama (Studi pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Fokus penelitian yang dilakukan Aditya Surya Dinata ialah tentang perlombaan memancing dengan sistem galatama. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Aditya Surya Dinata dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas secara umum pada pemancingan sistem Jackpot, pemancingan sistem galatama, dan akad usaha pemancingan. Objek kajian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pemancingan dengan sistem pembayaran tiket.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

‘Abd ar-Razzaq Hasan Faraj, *Nazhariyyah al-‘aqd al-Mauquf fi al-Fiqh al-Islami*: Dirasah Muqaranah bi al-Qamun al-Madani, Kairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969.

A. Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdulkodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2004.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: FH-UH, 1990.

Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Ali Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Amir Syafiruddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya Offset, 2016

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet 1,

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Hannan binti Muhammad Husein Jastanih, *Aqsâm al- 'uqûd fi al-Fiqh al-*

Islâmi, (Mekkah: Jam'iah Umm al-Qura, 1418 H/1998 M).

Hasabu Tarqimul Fathul Al-Barri, Shahih Bukhari, *Program Maktabah*

As-Samilah fersi II, Jilid III.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV.

Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I 'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al- 'Âlamin*,

Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M, Juz I.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Penelitian Riset Sosial*, Cetakan

ketujuh, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Khalid Abdullah id, *Mahadi' at-Tasyri' al-Islami*, Rabat: Syirkah al-Hillal

al-Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr, 1986.

Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum*

Keluarga dan Bisnis, Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2016.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2012.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami akad-akad Syariah*, Jakarta: Ganesa Press, 2000.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Penelitian Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997.
- Shahih Al-Bukhari, *Program Maktabah As-Samilah Edisi II*, dan Kitab Biyadatul Mujtahid, Jilid II.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*,

Bandung: Alfabeta, 2008.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*. Jilid I, Cetakan ke-IV, Yogyakarta:

Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1993.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad*

dalam Fiqh Muamalat, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2012.

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bulan

Bintang, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kolom 2, Jakarta: Balai Pustaka,

1995.

Zainal Abdulhaq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

B. Jurnal

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “*Akad Jual Beli*

Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal

Indonesia”. Jurnal al-Adalah, Vol. XII, Desember 2015.

Ruslan Abdul Ghofur, “*Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk*

Perbankan Syariah Di Indonesia”. Jurnal al-Adalah, Vol. XII, Juni

2015.

C. Wawancara

Bapak Atto Illah, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa

Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Kamil, *Wawancara* tanggal, 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Agus, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Budi, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Sugeng, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Eko, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Dika, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Agung, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Heru , *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Arif, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan

Bapak, Ardi *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Sutar, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Sutris, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Idrus, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Bapak Muklis, *Wawancara* tanggal 09 September 2019 di Desa Jatimulyo

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

